

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi telah memberikan perubahan besar pada kajian studi hubungan internasional, membuatnya menjadi semakin meluas di dalam ruang lingkup global. Globalisasi sendiri dipahami sebagai suatu fenomena meluas dan meningkatnya hubungan hubungan ekonomi, sosial, dan budaya yang melewati lintas batas negara (Sorensen dan Jackson, 2013). Politik dunia yang saat ini sudah tidak lagi didominasi oleh aktor *state* merupakan salah satu indikasi dari fenomena globalisasi yang semakin marak. Globalisasi membuat sistem politik menjadi terdesentralisasi dan memunculkan tren aktor-aktor baru dalam hubungan internasional.

Beberapa tahun belakangan ini aktor-aktor sub-nasional seperti pemerintah kota dan daerah mulai terlibat di dalam skenario-skenario tata kelola global. Selain diakibatkan oleh pengaruh globalisasi, keterlibatan aktor sub nasional tersebut juga diakibatkan oleh adanya tumpang tindih antara kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri juga antara *low politics* dan *high politics* (Wu, 2020: 19). Dalam mengatasi isu-isu urban yang semakin beragam, berbagai pemerintah kota dan daerah di seluruh dunia mulai membangun jaringan mereka melintasi batas-batas negara. Fenomena ini kemudian dinamakan sebagai jaringan kota transnasional atau *Transnational Municipal Networks* (TMN).

TMN merupakan sebuah paradigma baru dalam studi organisasi internasional. Paradigma ini melibatkan studi tentang tata kelola pemerintahan terkait proses pengambilan keputusan dan otoritas yang melibatkan pemerintah internasional, nasional maupun sub-nasional (Wiharani dan Holzhacker, 2016: 205). Beberapa peneliti seringkali mengaitkan TMN dengan isu-isu lingkungan global di Eropa. Betsill dan Bulkeley (2004: 471-472) dalam penelitiannya berjudul "*Transnational Networks and Global Environmental Governance: The cities for climate protection program*" menyebutkan bahwa TMN menjadi salah satu aktor yang signifikan

dalam mengatasi permasalahan iklim di Eropa khususnya melalui program yang bertajuk *Cities for Climate Protection (CCP)*. Dengan demikian, isu lingkungan menjadi salah satu isu yang seringkali diangkat dalam fenomena jaringan kota transnasional yang mana dalam hal ini pemerintah sub-nasional berada dalam posisi penting untuk beradaptasi dan memitigasi dampak dari masalah lingkungan.

Fenomena jaringan kota transnasional bisa dilihat pada organisasi *United Cities and Local Governments (UCLG)*. Sebagai sebuah jaringan kota global tertua di dunia yang saat ini masih berdiri, di tahun 2000 sebanyak 1000 kota dan 112 asosiasi pemerintah kota di 95 negara telah bergabung kedalam keanggotaan UCLG (*Cities Alliance*, tanpa tanggal). UCLG didirikan melalui gabungan dari *International Union of Local Authorities (IULA)*, *United Town Organization (UTO)* dan *World Association of the Major Metropolises (METROPOLIS)* dan memiliki peran dalam melibatkan aktor-aktor sub-nasional untuk memastikan tercapainya agenda-agenda global di level lokal maupun regional (UCLG, tanpa tanggal). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa UCLG memiliki tujuan tertentu dalam mencapai agenda-agenda global seperti pembangunan dan lingkungan yang mana kedua hal itu menjadi konsentrasi bagi cabang UCLG sendiri yang terletak di kawasan Asia Pasifik bernama *Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC)*.

UCLG ASPAC memiliki komitmen untuk membantu pengembangan juga implementasi aksi iklim dalam pencapaian SDGs (UCLG ASPAC, 2021). Di Indonesia sendiri khususnya, komitmen ini dituangkan melalui proyek kerjasama lingkungan yang bernama *Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC)*. Kerjasama ini melibatkan berbagai *stakeholder* salah satunya Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan memiliki tujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di kawasan urban, menciptakan *good governance* juga adaptasi/mitigasi iklim melalui kerjasama *triangular* pada kawasan-kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan dan Eropa (Gaborit *dkk.*, 2020) Dalam proyek tersebut, Kota Cirebon dipilih oleh UCLG ASPAC sebagai salah satu kota percontohan (*pilot project*) dalam penanganan permasalahan ketahanan iklim pada tahun 2020

lalu melalui pertemuan *Launching and Kick off Climate Resilience Inclusive Cities Project*.

Kota Cirebon merupakan salah satu kota yang tergabung dalam keanggotaan APEKSI yang mana asosiasi tersebut sendiri memiliki program kejasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan berkelanjutan. Sebagai sebuah kota yang terletak di kawasan pesisir utara Pulau Jawa, Kota Cirebon memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana iklim yang diakibatkan oleh kenaikan permukaan air laut. Di tahun 2020 yang lalu kenaikan permukaan air laut rata-rata dunia telah mencapai 91,3 milimeter yang mana merupakan di atas rata-rata tahun 1993 (Lindsey, 2021).

Isu ketahanan iklim sudah menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah Kota Cirebon sejak beberapa tahun belakangan ini. Isu ketahanan iklim di Kota Cirebon erat kaitannya dengan permasalahan pengelolaan sampah di kota tersebut yang masih belum teratasi. Wakil Walikota Cirebon Eti Herawati menjelaskan bahwa Kota Cirebon menghasilkan sampah hingga 350 ton setiap harinya (Handayani dan Puspita, 2021). Meskipun begitu, jumlah tersebut tidak dibarengi dengan ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sampah Kopi Luhur, jumlah sampah yang terus meningkat diperkirakan akan membuat Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Kopi Luhur mengalami kepenuhan dalam tiga tahun lagi. TPA Kopi Luhur selama ini menampung seluruh sampah di Kota Cirebon, namun tanpa adanya fasilitas pengelolaan sampah di tingkat masyarakat seperti RW, TPA tersebut tidak akan dapat digunakan lagi (Fikri, 2021).

Permasalahan pengelolaan sampah menjadi suatu hambatan tersendiri dalam membangun ketahanan iklim di Kota Cirebon. Hal ini juga dapat menghambat tercapainya agenda SDGs dimana diantara 17 tujuan SDGs, pembentukan kota tahan iklim di Kota Cirebon memiliki keterkaitan erat pada tujuan ke-11 mengenai kota dan pemukiman yang berkelanjutan dan tujuan ke-13 mengenai penanganan perubahan iklim.

Pemerintah Kota Cirebon pada dasarnya sudah memiliki berbagai upaya dalam menangani permasalahan ketahanan iklim antara lain dengan pengembangan program Kampung Iklim (Proklim), penanaman mangrove di kawasan pesisir pantai, hingga pengembangan program Pelayanan Sampah dan Kebersihan. Hal ini selaras dengan Misi ke-tiga Kota Cirebon yaitu: “Meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana umum berwawasan lingkungan” (Pemerintah Daerah Kota Cirebon, 2021). Melalui berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut, Kota Cirebon berhasil meraih berbagai penghargaan seperti Kota Terbaik Penyelenggara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) se-Jawa Barat, Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH), Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) Utama (Radar Cirebon, 2021). Dilihat dari upayanya, Pemerintah Kota Cirebon sendiri sudah sangat berperan dalam penanganan masalah lingkungan namun UCLG ASPAC tetap memilih Kota Cirebon sebagai salah satu kota percontohan dalam implementasi CRIC.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan riset yang diambil pada penelitian ini adalah “Mengapa UCLG ASPAC memilih Kota Cirebon sebagai salah satu kota percontohan dalam implementasi *Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC) Project*?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tujuan UCLG ASPAC memilih Kota Cirebon sebagai salah satu kota percontohan dalam implementasi kerjasama lingkungan terkait ketahanan iklim *Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC) Project* dengan menggunakan teori peran organisasi internasional.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tujuan UCLG ASPAC dalam pelaksanaan kerjasama lingkungan terkait ketahanan iklim di Kota Cirebon melalui *Climate*

Resilience and Inclusive Cities (CRIC) Project yang ditinjau menggunakan teori peran organisasi internasional.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang didapat dari penelitian ini yaitu, dapat dijadikan suatu rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang tujuan UCLG ASPAC pada umumnya, dan melalui *Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC) Project* di Kota Cirebon pada khususnya.

1.5. Sistematika Bab

Penelitian ini akan disajikan ke dalam lima bab dimana setiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub-bab pembahasan yang saling berkaitan satu sama lain. Bab-bab tersebut antara lain:

Bab pertama akan menguraikan sub-bab latar belakang yang mana berisi fenomena jejaring kota global dalam hubungan internasional dan inisiasi kerjasama lingkungan *Climate Resilience and Inclusive Cities* dalam rangka mengatasi permasalahan ketahanan iklim di Kota Cirebon. Kemudian dilanjut dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika bab.

Pada bab kedua, penelitian ini akan terdiri dari beberapa sub-bab antara lain: landasan teori, penelitian terhadulu dan kerangka pemikiran.

Bab ketiga, penelitian ini akan berisi metodologi penelitian yang mana terdiri dari beberapa sub-bab yaitu, jenis dan desain penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan bab inti yang akan terdiri dari beberapa sub-bab antara lain: ancaman perubahan iklim di Kota Cirebon, peran UCLG ASPAC dalam ketahanan iklim melalui CRIC dan tujuan UCLG ASPAC memilih Kota Cirebon.

Bab kelima merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan